

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA DI DESA ANGKASA KECAMATAN BANDAR  
PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Nama: Juriana**  
**NPM: 167310433**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA DI DESA ANGKASA  
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN KABUPATEN PELALAWAN  
TAHUN 2018**

**ABSTRAK**

JURIANA

167310433

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Indikator peneliti yang digunakan penulis ada 5 (lima) yaitu : Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Teknologi dan keuangan, Kepemimpinan, Program manajemen Proses, dan Jaringan Kerjasama. Tipe penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis. Dimana melakukan penelitian langsung ke Kantor Desa Angkasa agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Teknik penarikan informan peneliti dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan belum berjalan optimal hal ini dikarenakan lemahnya sumberdaya manusia dan kepemimpinan oleh kepala desa. Dalam penelitian ini tingkatan organisasi menjadi acuan yang harus dikembangkan, yang mana berkaitan dengan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa yang tentu dikaitkan dalam tingkat pendidikan aparatur desa yang terbilang minim, hal lainnya yaitu dalam proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan koordinasi antara pemerintah desa dengan seluruh elemen masyarakat secara umum.

Kata Kunci : Kapasitas ; Pemerintah Desa ; Pengelolaan ; Alokasi Dana Desa.

**VILLAGE GOVERNMENT CAPACITY IN MANAGING VILLAGE FUND  
ALLOCATIONS IN ANGKASA VILLAGE  
KECAMATAN BANDAR PETALANGAN PELALAWAN DISTRICT 2018**

**ABSTRACT**

JURIANA

167310433

*This study aims to identify and explain the capacity of the village government in managing village fund allocation in Angkasa Village, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency. There are 5 (five) researcher indicators used by the author, namely: Human Resources, Infrastructure, Technology and Finance, Leadership, Process Management Programs, and Cooperation Networks. This type of research uses descriptive qualitative research methods of analysis. Where to conduct direct research to the Angkasa Village Office in order to get existing problems based on actual facts when researching using descriptive survey research type with observation, interviews and documentation as data collection tools. The technique of withdrawing research informants was carried out using purposive sampling, namely the sampling technique adjusted to certain criteria, namely through people who are directly involved in managing village fund allocations in the village of Angkasa, Bandar Petalangan District, Pelalawan Regency. Based on the research conducted, it was found that the capacity of the village government in managing village funds allocation in the village of Angkasa, Bandar Petalangan, Pelalawan district has not been running optimally, this is due to the weakness of human resources and leadership by the village head. In this study, the organizational level becomes a reference that must be developed, which is related to the capacity of the village government in managing village fund allocation which is of course related to the minimal education level of village officials, another thing is in the decision-making process that does not involve coordination between the village government and the all elements of society in general.*

*Keywords: Capacity ; Village Government ; Managemen ; Village fund allocation.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahim.*

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018”**. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat, dorongan serta doa yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

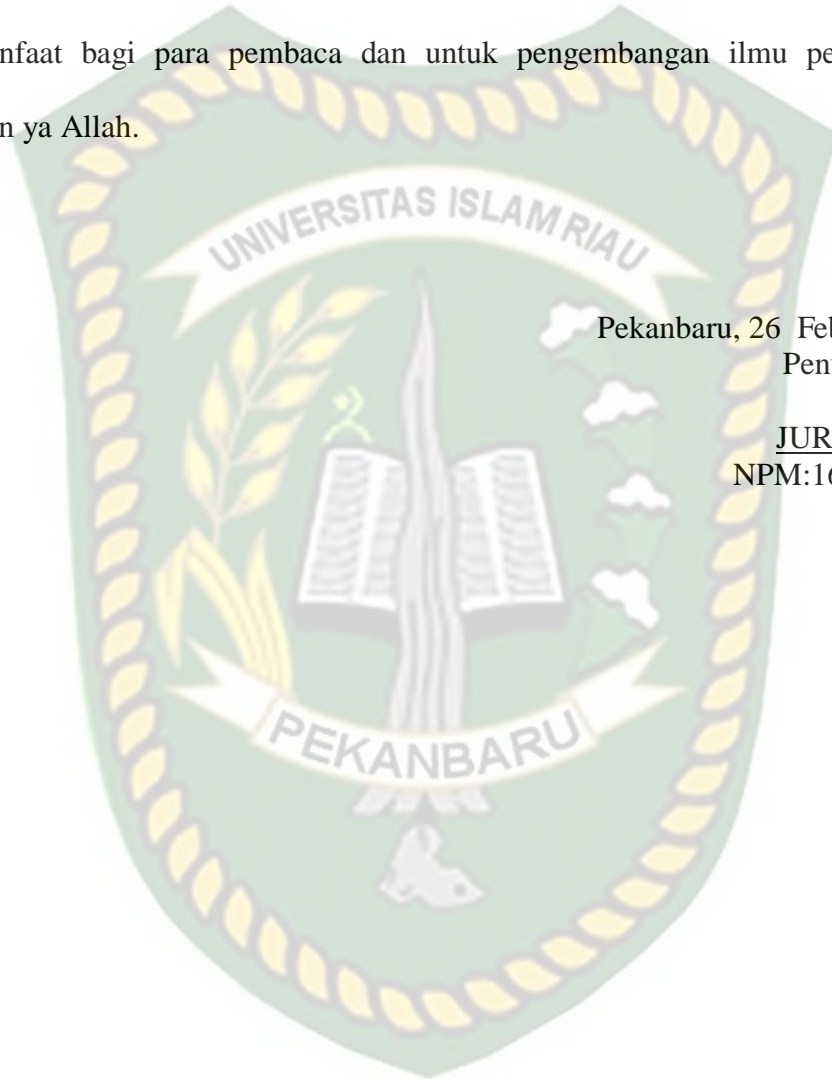
1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen-Dosen Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua Ilmu yang dimiliki kepada penulis.
6. Dan terima kasih juga kepada Ayahanda Pariaman Dan Ibunda Upik tersayang yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, membina, terima kasih untuk pengorbanan selama ini kepada penulis, Dan memenuhi permintaan penulis selama dalam menyelesaikan penelitian. Serta Abang (Suprianto S.Pi), Adik (Fitriana,Widya Wahyuni) yang selalu mendampingi penulis.
7. Seluruh Informan di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala Dusun dan Perangkat Desa yang bersedia memberikan Informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis. serta kepada Normansyah yang telah memberikan semangat,motivasi,meminjamkan laptop kepada penulis. Kepada Ayu Lestari yang selalu mendukung dan menemani penulis dari awal hingga saat akhir penyusun Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini mendapat keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin ya Allah.

Pekanbaru, 26 Februari 2021  
Penulis

JURIANA  
NPM:167310433



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C .Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1. Tujuan penelitian .....	9
2. Kegunaan penelitian .....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>11</b>
A.Studi Kepustakaan .....	11
1. Pemerintahan .....	11
2. Ilmu Pemerintahan.....	14
3. Pemerintahan Desa .....	16
4. Manajemen .....	19
5. Pemberdayaan.....	21
6. Alokasi Dana Desa .....	23
7. Pengelolaan Keuangan Desa .....	25
8. Kapasitas Pemerintahan.....	28
B.Penelitian Terdahulu.....	32
C.Kerangka Pikiran .....	35
D.Proposisi Penelitian .....	36
E.Konsep Operasional .....	36

F.Operasional Variabel.....	38
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Tipe Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	47
<b>BAB IV .....</b>	<b>48</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan .....	48
B. Gambaran Umum Desa Angkasa .....	50
1. Sejarah Pembentukan Desa .....	50
2. Struktur Pemerintah Desa Angkasa.....	52
3. Letak Geografis Desa Angkasa .....	54
<b>BAB V.....</b>	<b>56</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
A. Identitas Informan .....	56
1. Jenis Kelamin Informan .....	56
2. Usia Informan.....	56
3. Tingkat Pendidikan Informan.....	57
B. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan .....	58
1. Sumberdaya .....	59
1.1 Sumberdaya manusia .....	59
1.2 Infrastruktur .....	62
1.3 Teknologi dan sumberdaya keuangan.....	64
2. Manajemen .....	68
2.1 Kepemimpinan.....	68



2.2 Program dan manajemen proses .....	71
2.3 Jaringan kerjasama.....	75
<b>BAB VI.....</b>	<b>80</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 : Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Angkasa.....	5
Tabel I.2 : Sumber Pendapatan Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Khususnya Alokasi Dana Desa dari tahun 2016-2018 .....	6
Tabel I.3 : Pembangunan Fisik yang Dilaksanakan di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Sumber Pendapatan Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar.....	7
Tabel II.1 : Penelitian Pendahulu .....	28
Tabel II.2 : Operasional Variabel Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan .....	34
Tabel III.1 : Informan Penelitian.....	36
Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan .....	42
Tabel V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Usia.....	52
Tabel V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.....	31
Gambar IV.1 : Peta Kabupaten Pelalawan.....	43
Gambar IV.2 : Stuktur Pemerintah Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Periode 2014-2020.....	47

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Desa dalam kedudukannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilepas pisahkan dengan berbagai keberadaan daerah yang lain, baik itu provinsi atau kabupaten/kota. Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dimana, keberadaan suatu Negara Kesatuan pada hakekatnya menempatkan kekuasaan tertinggi dan penyelenggara segenap urusan Negara yaitu pemerintah pusat, hal tersebut terkait dengan adanya asas bahwa dalam Negara kesatuan segenap urusan Negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga urusan-urusan Negara dalam suatu Negara kesatuan tetap merupakan suatu kebetulan dan dipegang oleh pemerintah pusat

Dalam system Pemerintahan Desa di Indonesia terdapat adanya 2 (dua) unsur penyelenggara pemerintahan desa, yakni unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa + Perangkat Desa) dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Pengertian dari Pemerintahan Desa sudah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.” Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahannya seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalisir. Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat ditentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam Pembangunan Nasional yang menyeluruh. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak di bangun tingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu yang dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintaah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan, administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa. APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Sumber-Sumber pendapatan desa berasal dari :

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan otonomi merupakan jawaban yang sangat tepat dalam mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembangunan Pemerintah Desa demi mewujudkan suatu tujuan pemerintahan. Kemampuan ini erat sekali dengan kapasitas dimana Kapasitas atau *Capacity* disini lebih bermakna kemampuan, hal ini sebagaimana pendapat Menurut Moenir (dalam Rhara Sulistia 2015:4) menyatakan bahwa kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa dengan yang diharapkan. Menurut Riyadi (dalam Rhara Sulistia 2015:2) kapasitas pemerintah dilaksanakan dalam tiga tingkatan:

1. Pada tingkatan individual : Secara umum di lakukan dengan pendidikan, pengajaran , dan pembelajaran secara luas kepada individu itu sendiri dengan berbagai macam metode baik metode pendidikan dengan pendekatan pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tapi juga melalui

non formal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisai dan lain-lain.

2. Pada tingkatan organisasi: Secara umum dilakukan dengan pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, sistem manajemen, pengembangan sumber daya manusia, serta pengembangan jaringan organisasi
3. Pada tingkatan sistem : Terutama dilakukan baik melalui pengembangan kebijakan, peraturan ( regulasi dan deregulasi ) agar sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya tujuan individu maupun organisasi tersebut.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang masih rendah akan mempengaruhi kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang administrasi. Berikut ini merupakan daftar tingkat pendidikan Aparatur Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan :

**Tabel I.1 : Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Angkasa**

NO	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Rudi Suprianto, S.IP	Kepala Desa	Sarjana
2	Khosni Mubarak	Sekretaris	SMA
3	Afrizal.,S.Pd	Ketua BPD	Sarjana
4	Juliani	Kaur keuangan	SMA
5	Dira Sartika	Kasi pelayanan	SMA
6	Oktian Wulandari	Kasi Pemerintahan	SMA
7	Indra	Kasi Kesra	SMA
8	Bagus Primanda	Kaur Tata Usaha dan Umum	SMA
9	Rika Susanti	Kasi Perencanaan	SMA
10	Edo Klara Saputra	Kadus 1	SMA
11	Adi Yulisman	Kadus 2	SMA
12	Ambri	Kadus 3	SMK
13	Renta Rianti Marpaung	Kadus 4	SMA

*Sumber: Profil Desa angkasa kecamatan Bandar petalangan kabupaten pelalawan.*



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pemerintah desa Angkasa masih rendah hanya ada dua orang yang berpendidikan sarjana, sedangkan aparatur lainnya hanya berpendidikan SMA. Rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam penelitian ini, Terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dari tahun 2016-2018 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel I.2 : Sumber Pendapatan Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Khususnya Alokasi Dana Desa dari tahun 2016-2018.**

NO	Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2016	Alokasi Dana Desa (ADD)	755.213.00
2	2017	Alokasi Dana Desa (ADD)	788.037.000,00
3	2018	Alokasi Dana Desa (ADD)	821.947.300,00

*Sumber : Kantor Kepala Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan*

Berdasarkan tabel I.2 diatas dapat diketahui bahwa sumber pendapatan Anggaran Alokasi Dana Desa relatif cukup besar dan dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dengan besarnya Alokasi Dana desa tersebut membutuhkan kemampuan/kapasitas dalam mengelolanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

**Tabel I.3 Pembangunan Fisik yang dilaksanakan di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan**

No.	Jenis Kegiatan	Biaya	Tahun	Tingkat Pencapaian
1.	Pembangunan Semenisasi Jalan Desa	Rp.582.631.000,-	2018	100 %
2.	Pembangunan Drainase	Rp.254.280.000,-	2018	100 %
3.	Pembangunan Turap	Rp.317.000.000,-	2018	100%
<b>Jumlah</b>		Rp. 1.153.911.000.00		

Sumber : Kantor Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018

Bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat. Berdasarkan dari data anggaran pembangunan fisik/infrastruktur desa yang terlihat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran dana yang telah dikeluarkan sudah sesuai dan sudah mencapai tingkat yang baik. Walaupun dana anggaran yang telah dikeluarkan sesuai dengan yang seharusnya, namun pembangunan yang terjadi dan yang terlihat dilapangan tidak sesuai. Karena ini terlihat masih banyaknya kawasan-kawasan atau tempat tertentu yang masih belum memadai seperti dana anggaran yang disampaikan diatas, dengan artian anggaran dana yang digunakan tersebut tidak tepat sasaran.

Dengan demikian, seperti yang telah di anggarkan dalam perencanaan pembangunan desa yang dibuat sudah sesuai, namun hasilnya belum sesuai dengan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan prasurey penulis dilapangan, yakni di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, ditemukan hal-hal antara lain:

1. Penggunaan alokasi dana desa menjadi tidak maksimal untuk pembangunan melihat kondisi semenisasi yang jaraknya tidak jauh dan sudah rusak sedangkan anggaran pendapatan desa relative cukup besar dari tahun ketahun.
2. Minimnya kemampuan pemerintah desa dalam bidang pengelolaan Alokasi Dana Desa disinyalir dengan rendahnya tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa yang kurang memadai, meninjau pendidikan aparatur desa yang rata rata hanya SMA. Sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
3. Keterlambatan desa melaporkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan keterlambatan melaporkan laporan realisasi pertanggungjawaban (LRP) sehingga menyebabkan lambatnya dana disalurkan ke desa. Yang seharusnya minggu kedua bulan agustus tahun berjalan tapi nyatanya dilaporkan di akhir tahun.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena empiris yang penulis temukan dilapangan yaitu di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan

Kabupaten Pelalawan sesuai yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul :**“Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2018.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kabupaten Pelalawan?”

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa.

### **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

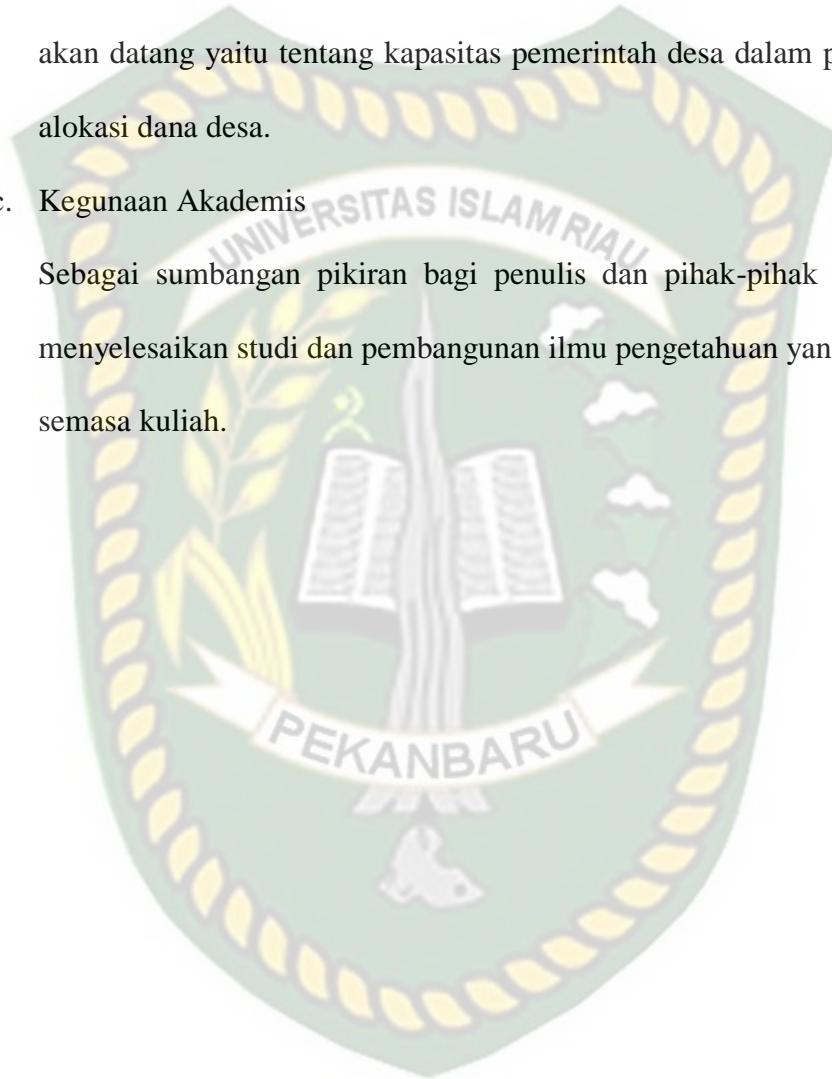
Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga bisa menjadi sumber informasi atau bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Desa dan Kepala Desa dalam pelaksanaan kinerja pemerintah desa terkait pengelolaan alokasi dana desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah yang sama lebih lanjut pada masa yang akan datang yaitu tentang kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

c. Kegunaan Akademis

Sebagai sumbangan pikiran bagi penulis dan pihak-pihak yang ingin menyelesaikan studi dan pembangunan ilmu pengetahuan yang diperoleh semasa kuliah.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini sangat diperlukan konsep-konsep dan landasan teori serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemerintah, evaluasi, kebijakan, perencanaan dan pembangunan dalam hal pelaksanaan pembangunan desa, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian peneliti yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik, semoga yang menjadi acuan dari penelitian ini tidak keluar dari kerangka dan tujuan penelitian yang dimaksud.

#### 1. Pemerintahan

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pemerintahan, secara etimologi menurut Syafiie (2007 : 4) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perintah bearti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang bearti didalamnya
2. terdapat dua pihak, yaitu yang memrintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatutan akan keharusan.
3. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang bearti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
4. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Bearti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Syafiie (2011 : 8) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa

pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Suryaningrat (1992:2) pemerintahan adalah perbuatan atau cara urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan.

Kemudian menurut Mac Iver (dalam Syafiie 2007 : 45) mengartikan pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan (government is the organization of men under authority). Bila diterima menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri.

Sedangkan menurut Ndraha (2011 : 5) Pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai pelanggan, consumer, yang tidak berdaya, dan sebagainya.

Jadi, berdasarkan teori-teori tentang pemerintahan yang dijelaskan diatas, maka dikuatkan dan disimpulkan menurut Kitab Suci Al-Qur'an dalam Syafiie (2013 : 12) menjelaskan bahwa definisi Pemerintahan adalah segolongan umat

yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

Menurut Ndraha (2011 : 6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimannya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melaksanakannya.

Kemudian menurut Bevir (dalam Wasistiono 2015 : 87 ) Pemerintah adalah acara untuk memerintah entitas tertentu pada saat tertentu pula dan kata pemerintah merujuk pada metode tertentu, tujuan, dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh Negara.

Selanjutnya dikuatkan dengan teori Menurut Woodrow Wilson (dalam Syafiie 2013 : 10) menjelaskan bahwa Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kelompok kemasyarakatan.



Jadi, berdasarkan ketiga teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

## **2. Ilmu Pemerintahan**

Pengertian pemerintahan dan pemerintah terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan Negara, yaitu pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti yang sempit yaitu aparatur/alat kelengkapan Negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan kekuasaan eksekutif saja.

Menurut Ndraha (2011:7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap-tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Kencana Syafiie (2007:20) Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karna berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkait serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Wilson (dalam Syafiie 2010:23) mengatakan pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Rosenthal (dalam Syafiie,2007:37) mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Sedangkan menurut Brasz (dalam Syafiie,2007:35) berpendapat ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Menurut Syafiie (2010;23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan, pengaturan, kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya). Dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Gaffar (Dalam Ndraha 2010:16) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Kemudian menurut Wasistiono (2015:61) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu Negara yakni pemerintah berhubungan dengan masyarakatnya dalam kaitan hak dan kewajiban kepada Negara. Sebaiknya warga Negara mempunyai hak dan kewajiban kepada Negara.

Jadi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan kordinasi secara baik dan benar antara yang memerintah dengan yang di perintah ilmu pemerintahan mempelajari pemerintah dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan) jadi normative ideal, dan yang kedua dari sudut senyatanya pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak jadi empiric. Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan.

### **3. Pemerintahan Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan adat istiadat setempat yang dihormati system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan optimal.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri atas sekretaris desa dan perangkat lainnya. Dengan gambaran tersebut diatas maka dapatlah dikatakan bahwa perangkat pemerintah mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang menyangkut masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan pada khususnya.

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van indie pada masa penjajahan colonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia (dalam Wasistiono dan M. Iwan Tahir 2007 : 7).

Adapun menurut Bournen (dalam Nurcholis 2011: 4) Desa adalah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak ribu orang, hampir semuanya mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam.

Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah social.

Menurut Aang (2002:33) menjelaskan bahwa pemerintahan Desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses social di masyarakat. Tugas utama yang harus diembankan pemerintahan desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberikan layanan social yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.

Menurut Widjaja (2003:3) menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan manusia.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:73) Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
  1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
  2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
  3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

#### 4. Manajemen

Menurut manullang (dalam Zaidan 2013:8) ada tiga jenis kelompok pengertian manajemen, *pertama* manajemen sebagai suatu proses, *kedua* manajemen sebagai suatu kolektivitas orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, dan *ketiga* manajemen suatu ilmu dan seni. Sedangkan menurut Mary (dalam Zaidan 2013:10) ia mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau sebagai pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada sehingga hasilnya maksimal.

Menurut J.G. Longenecker (dalam zaidan 2013:11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengoordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan. Sementara itu Henry L.Sisk mendefinisikan manajemen sebagai koordinasi dari semua sumber (tenaga manusia, dana, material, waktu, metode kerja, dan tempat) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian supaya dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Menurut Siswanto ( 2005 : 24) Manajemen adalah ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untk mencapai tujuan. Manajemen terdiri dari limafungsi pokok, yakni:

1. Perencanaan (planning)
2. Pengorganisasian (organizing)
3. Pengarahan (directing)
4. Pemotivasian (motivating)
5. Pengendalian (controlling)

Menurut Stoner (dalam Zulkifli 2005:28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut Stoner (dalam Zidan 2013:12) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jika disederhanakan manajemen sebagai suatu proses itu melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sebagaimana rumusan *Encyclopedia of The Sosial Science*, bahwa manajemen itu merupakan suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan seterusnya kembali pada kegiatan awal berupa perencanaan sebagai suatu yang kontinum. Melalui proses para pemimpin (manajer) menggunakan semua sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan John D. Millet (dalam Siswanto 2012:1) berpendapat bahwa manajemen suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa menurut pendapat para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja yang mengandung lima gagasan utama yaitu, merancang,

mengorganisasikan, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

## 5. Pemberdayaan

Menurut Rahman (2016 : 195) menggambarkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat menempatkan masyarakat sebagai subjek dan pelaku utama dalam proses pembangunan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memberikan wewenang secara proposional kepada masyarakat desa dalam membangun diri dan lingkungannya, singkatnya masyarakat di ikutsertakan dalam setiap proses pembangunan.

Suharto (2006:58) mendefinisikan pemberdayaan antara lain sebagai berikut :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang yang lemah ataupun tidak beruntung.
2. Pemberdayaan merupakan suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi melalui berbagai pengontrolan, serta mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, serta kehidupan orang lain yang
3. menjadi perhatiannya.
4. Pemberdayaan ditunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur social.
5. Pemberdayaan merupakan sebuah cara dengan nama rakyat, organisasi serta komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya.

Menurut Randy (dalam Zulkarnain 2010:25) Pemberdayaan adalah sebuah proses “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan : penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Menurut Usman (dalam Zulkarnain 2010:26) menjelaskan bahwa dalam pengertian terminologis pemberdayaan (*empowerment*) dapat didefinisikan



sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Kemudian menurut Wahjudin (dalam Chandra 2013:3) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Wrihantnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan sebuah proses instan, sebagai suatu proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Menurut Freire (dalam Zulkarnain 2010:26) lebih jauh menjelaskan bahwa proses pemberdayaan merupakan metode yang berusaha mengubah persepsi termasuk mengubah motivasi atau dorongan seseorang dalam lingkungan masyarakat, sehingga memungkinkan individu beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan Pearse dkk (dalam Zulkarnain 2010:26) lebih cenderung memberikan istilah “pemberdayaan partisipatif” yang mengandung bentuk-bentuk seperti: menghormati kekhasan local, dekonsentrasi kekuasaan dan peningkatan kemandirian.

Selanjutnya Pranarka dan Priyono (dalam sedarmayanti 2000 : 79) mengatakan bahwa pengertian pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yaitu: (1) Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai

kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. (2) Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

## 6. Alokasi Dana Desa

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.

Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa/rekening Desa, Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Bantuan langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana Bantuan Langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi

desa. Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten provinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan dana dari APBDnya kepada desa. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan social dan ekonomi masyarakat.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## **7. Pengelolaan Keuangan Desa**

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang *output*-nya berupa

pelayanan public, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa merupakan anggaran yang dikucurkan dari pemerintah untuk pembangunan desa. Dengan demikian pengertian Dana Desa yang diterima desa untuk pembangunan adalah dana yang dikucurkan bagi desa dari pusat untuk membangun desa supaya tercipta desa yangn lebih baik, lebih maju, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena dana desa bertujuan memberikan sarana atau prasarana hingga masyarakat desa bisa terbantu dalam meningkatkan perekonomiannya. Dari adanya dana desa diharapkan kemiskinan di desa,keterbatasan ekonomi bisa berkurang dengan banyaknya sarana yang dibangun dari anggaran dana desa sehingga terciptalah desa yang penuh karya kreatifitas dan inovasi dari desa untuk semua warga masyarakat indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikan ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat

kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap.

Tidak jauh berbeda dengan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 6 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut Adisasmita (2011:22), Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Arif (dalam Tahir dkk 2019) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Nurcholis (2011:82) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai mulai 1

januari sampai dengan 31 desember. Pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan, dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### **8. Kapasitas Pemerintahan**

Kapasitas merupakan konsep yang menunjukkan kepada kemampuan suatu unit tertentu. Seperti individu, organisasi dan system. Pemahaman ini bisa dilacak dari berbagai ahli. Diantaranya adalah Milen yang mengemukakan bahwa kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi atau system untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus. Milen juga menjaelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fungsi

sebagaimana mestinya”, memiliki kaitan dengan tugas-tugas pokok yang ditetapkan dari pekerjaan tim, organisasi atau system.

Mengacu pada pengertian kapasitas di atas maka kapasitas merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang. Apabila seseorang tersebut menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan sesuai peran yang diembannya untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan responsivitas dari kinerja Pemerintahan.

Diketahui juga pengertian tentang kapasitas dari morgan yang mendefinisikan kapasitas sebagai *“capacity is the emergent combination of attributes that enables a human system to create development values”* kapasitas dalam pengertian ini juga menunjuk kepada kemampuan untuk melakukan sesuatu, hanya saja lebih memuat sebagai bentuk kombinasi dari berbagai atribut yang menjadi pendorong bagi kinerja suatu system dalam upayanya untuk menciptakan nilai-nilai pembangunan. Morgan (dalam Simon 2018:7-8) juga mengemukakan bahwa terdapat lima karakteristik pokok atau aspek dari kapasitas yaitu :

1. Kapasitas adalah pemberdayaan dan identitas kelengkapan yang dapat mengarahkan organisasi atau kompleks. Agar dapat berkembang dalam cara tersebut, system membutuhkan kekuasaan, kendali ruang. Kapasitas tersebut dilaksanakan secara bersama sama dengan tindakan masyarakat untuk mempengaruhi kehidupan masing-masing dalam gaya tertentu.
2. Kapasitas dilakukan dengan kemampuan bersama, hal ini terdiri dari kombinasi antribut-antribut yang membuat system berjalan, nilai penyampaian memperkuat hubungan dan memperbarui dirinya sendiri. Dalam istilah yang lain merupakan kemampuan membuat system individu, kelompok, organisasi, kelompok organisasi mampu melakukan sesuatu dengan intens dan efektif serta dalam rangka tertentu.



3. Kapasitas merupakan kelengkapan penting atau sebagai efek interaksi. Hal tersebut muncul keterlibatan dinamis dari kombinasi kompleks perilaku, sumber daya, strategi dan keahlian baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kapasitas dalam hal ini diperkuat dari posisi system dalam konteks tertentu dan biasanya berkaitan dengan aktivitas kompleks manusia yang tidak dapat hanya dilihat dari perspektif teknik eksklusif.
4. Kapasitas merupakan wujud potensial yang temporer dan sulit dimengerti. Hal itu tentang kondisi laten sebagai posisi oposisi dari energy kinetic. Kinerja secara kontras merupakan tentang eksekusi dan implementasi atau hasil dari aplikasi atau penggunaan kapasitas. Sesuatu yang *given* dalam kualitas laten ini, bahwa kapasitas tergantung kepada derajat luas yang tidak berwujud yang sulit untuk dipengaruhi, dikelola dan diukur. Sebagai wujud atau kondisi yang dapat menghilang secara cepat salam struktur yang kecil dalam dan rentan. Wujud potensial ini membutuhkan penggunaan pendekatan yang berbeda dalam pembangunan, manajemen, pengukuran dan monitoring.
5. Kapasitas adalah tentang penciptaan nilai-nilai public. Semua Negara dalam derajat pembangunan mereka masing-masing, memiliki beberapa contoh kapasitas efektif yang menjatuhkan kepentingan public. Bentuk yang paling jelas adalah korupsi yang terorganisasi dan pemanjaraam institusi public. Pada beberapa Negara, beragam jenis kapasitas yang berkompetisi untuk kekuasaan, kendali dan sumber daya. Kapasitas dalam hal ini merujuk kepada kemampuan suatu kelompok atau system untuk berkontribusi positif terhadap kehidupan public.

Menurut Wardianto (dalam Hafiz 2017:11) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang memungkinkan sebuah institusi menjadi lebih efektif dalam pelaksanaan program-program kegiatan sehingga tujuan dapat dicapai, baik dilingkungan organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Menurut Brown (dalam Hafiz 2017:8) mendefinisikan kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu system untuk mencapai tujuan yang di cita-citakan. Kapasitas adalah

sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya.

Menurut Morgan (dalam Hafiz 2010:9) kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, dan system yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Kapasitas dapat diukur melalui 3 indikator yaitu:

1. Pemahaman, Memahami melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
2. Keterampilan, Terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.
3. Kemampuan, Mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

Sedangkan menurut Nurcholis (2005:53) yang mendefinisikan kapasitas yaitu, Upaya menyesuaikan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan serta mereformasi lembaga-lembaga, memodifikasi mekanisme, prosedur dan koordinasi, meningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia, dan mengubah system nilai dan sikap individu sebagai suatu cara untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih demokratis dan mensejahterakan masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori Horton, untuk melihat kapasitas pemerintah desa. Horton, et. al (dalam Mislaili dkk 2019:4) menjelaskan bahwa untuk melihat kelembagaan dapat melalui elemen kapasitas yaitu sumber daya (sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan keuangan) dan

manajemen (kepemimpinan, program dan manajemen proses, dan jaringan kerjasama).

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Herlinda Rahma 137110173 (2017)	Studi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pebaun Hilir Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2016	1. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Arif (2007:32)	1. menggunakan metode penelitian kualitatif
2	Rhara Sulistia (2015)	Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015	1. Kapasitas bermakna kemampuan menurut Moenir (2002 : 116) kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat melakukan tugas sehingga menghasilkan barang/jasa yang diharapkan.	1. menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif
3	Osis Wandu 147310733	Evaluasi Penggunaan	1. Evaluasi adalah proses	1. menggunakan metode

	(2019)	Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Genduang Dan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya berdasarkan perbub No 7 tahun 2017 biaya operasional 30% dan biaya pemberdayaan masyarakat 70%	penelitian kualitatif deskriptif
4	Imam Madiyono Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No.2 November tahun2016	Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa	Lebih memakai teori pengembangan kapasitas (capacity building)	Memfokuskan pada bagaimana kapasitas perangkat desa dalam mengelola alokasi dana desa.
6	Rayun Ramadhan 187321004 (2020)	Kapasitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Sehat dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.	Focus kepada kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan program penyediaan air minum sehat dan sanitasi berbasis masyarakat.	Menggunakan teori kapasitas sebagai variable dalam penelitian.
7	Okparizon, Dkk Jurnal penelitian social politik Vol. 8 No.1 Juni 2019	Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan.	Untuk menganalisis bagaimana mewujudkan kapasitas organisasi yang efektif pada Desa Wisata Kabupaten Bintan.	Menggunakan teori pengembangan kapasitas (capacity building)
8	Mislaili, Dkk Jurnal Ilmu	Kapasitas BUMDes Dendang	Untuk menganalisis	Menggunakan teori

	Administrasi Negara	Bertuah Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.	bagaimana kapasitas BUMDes Dendang Bertuah Dalam Pengelolaan Potensi Wisata.	kapasitas sebagai variable dalam penelitian.
9	Elma Julita Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 Edisi 1 Januari 2018	Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016	Memfokuskan ke manajemen pengelolaan Dana Desa (DD).	Sama-Sama pengelolaan Keuangan Desa.
10	Rahman, K. (2016).	Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Focus ke pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.	Teori pemberdayaan

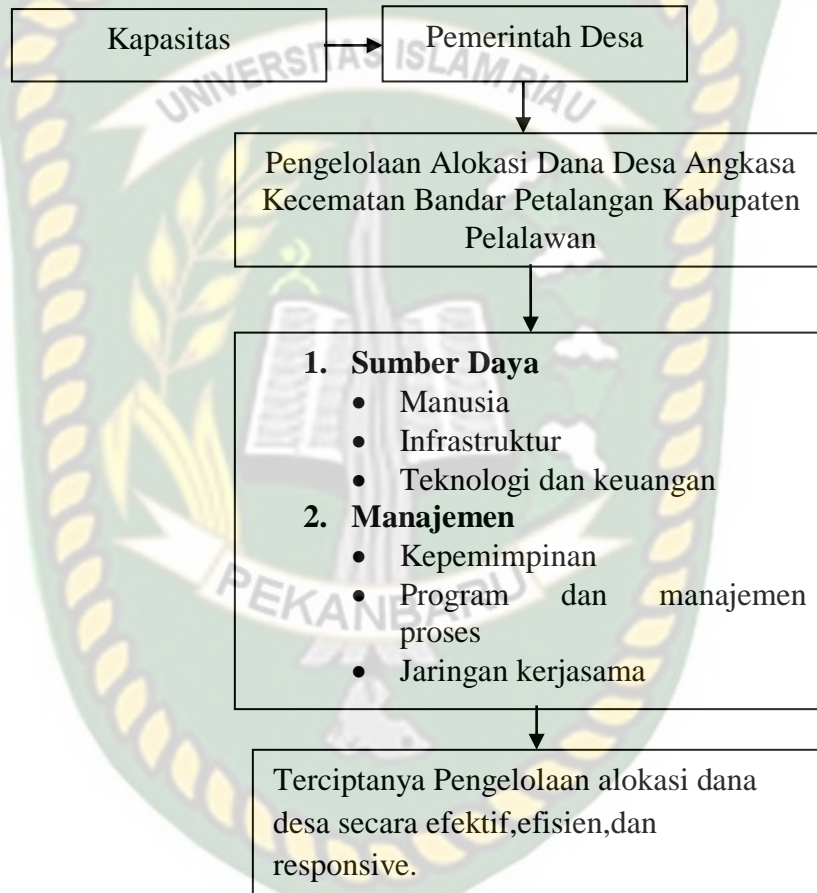
Sumber: Modifikasi peneliti 2020

Berdasarkan table diatas dapat dilihat penelitian terdahulu mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, dimana penelitian-penelitian memiliki fenomena-fenomena yang berbeda, begitu juga berbedanya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian tersebut, studi kepustakaan yang banyak mengambil teori dan kerangka pikiran yang berbeda. Sedangkan penulis Focus kepada kapasitas pemerintah desa yang menggunakan teori kapasitas sebagai variable dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis pada pengelolaan Alokasi Dana Desa. Serta penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis.

### C.Kerangka Pikiran

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan**



*Sumber: Modifikasi Peneliti 2020, dari teori Horton (2003)*

Dalam penelitian ini akan membahas tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2018 . diharapkan pemerintah desa mampu menyelenggarakan proses pengelolaan alokasi dana desa dengan melihat indicator sumber daya yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi

dan keuangan dan manajemen yaitu manajemen kepemimpinan, program, manajemen proses dan jaringan kerjasama agar terciptanya pengelolaan alokasi dana desa dengan efektif, efisien, dan responsive.

#### **D.Proposisi Penelitian**

Proposisi adalah jawaban sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan Kerangka Berfikir tersebut, maka peneliti membuat proposisi penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, akan berhasil apabila adanya Kapasitas sumber daya yang terdiri dari Manusia, Infrastruktur, Teknologi, Keuangan. dan kapasitas manajemen yang terdiri dari Kepemimpinan, Program dan Manajemen Proses, Jaringan Kerjasama.

#### **E.Konsep Operasional**

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis memaparkan penjelasan tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu sebagai berikut :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.
2. Pemerintah Desa adalah sebagai administraror penyelenggara utama aktifitas pemeritahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maupun Pembina ketentraman dan ketertiban wilayah pedesannya.

3. Alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).
4. Kapasitas adalah kemampuan berasal dari kata mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang/jasa dengan yang diharapkan.
5. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan, sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik yang meliputi: Manusia, Infrastruktur, Teknologi dan Keuangan.
6. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan manusia dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang meliputi: Kepemimpinan, Program, Manajemen Proses dan Jaringan Kerjasama.



## F.Operasional Variabel

Operasional variable adalah merupakan batasan yang telah ditentukan dalam penelitian ini yang mana didapatkan berdasarkan teori yang terdapat pada studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, operasional variable disajikan dalam bentuk table agar lebih mudah dalam penyusunan uraian konsep variable, yang mana terdiri dari indikator, ukuran skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II.2 : Operasional Variabel Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.**

NO	Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	Menjelaskan bahwa untuk melihat kelembagaan dapat melalui elemen kapasitas yaitu sumber daya dan manajemen. Horton et.al (dalam Mislaili dkk hal:4)	Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Sumber Daya  Manajemen	a. Sumber daya manusia b. Infrastruktur c. Teknologi d. Dan keuangan  a. Kepemimpinan b. Program c. Manajemen proses d. Dan jaringan kerjasama

Sumber :Modifikasi peneliti 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana melakukan penelitian langsung ke kantor desa angkasa dengan cara mengumpulkan data-data dan fakta yang diperoleh selama penelitian untuk kemudian di analisis dan di proses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang ada.

Menurut Effendy (2010 ; 117) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau tanggapan. Sedangkan menurut Sarwono (2006:194), dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri. Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan sekaligus penyelesai masalah. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dan perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan social yang menjadi focus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Angka Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Alasan utama pengambilan lokasi penelitian ini karena terindikasi minimnya kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa disinyalir dengan rendahnya tingkat pendidikan aparatur pemerintah desa yang kurang memadai. Meninjau pendidikan aparatur pemerintah desa yang rata-rata hanya SMA.

## C. Informan Penelitian

Bungin (2007:107) informan penelitian berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Maka dalam penelitian ini menjadi informan penelitian ini meliputi :

**Tabel III.I Informan Penelitian**

NO	Informan	Jabatan	Pendidikan	Usia
1	Muktharius, M.Pd	Camat	Strata Satu	43 tahun
2	Rudi Suprianto, S.IP	Kepala Desa	Strata Satu	32 tahun
3	Khosni Mubarak	Sekretaris Desa	SMA	30 tahun
4	Juliani	Kaur Keuangan	SMA	27 tahun
5	Edo Klara Saputra	Kadus	SMA	23 tahun
6	Saner	Tokoh Masyarakat Adat	SD	49 tahun

*Sumber : Modifikasi Peneliti 2020*

Berdasarkan tabel diatas peneliti menjumpai informan secara informal ada yang didatangi di kantor dan di rumah. Dalam menentukan informan, peneliti

menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih dalam wawancara peneliti ini dapat di bagi menjadi 6 bagian yaitu :

1. Mukhtarius, M.Pd selaku Camat Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sebagai informan untuk mengetahui Kapasitas Pemerintah desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Rudi Suprianto, S.IP Selaku Kepala Desa peneliti menjadikan informan karena Beliau Pimpinan yang terlibat langsung dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.
3. Khosni Mubarak Selaku Sekretaris Desa. Karena banyak melakukan verifikasi, melakukan pengecekan, sekretaris juga sebagai koordinator dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Juliani Selaku Kaur Keuangan peneliti menjadikan informan karena setiap penatausahaan keuangan desa wajib dilakukan oleh kaur keuangan desa.
5. Edo Klara Saputra Selaku Kepala Dusun yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya.
6. Saner Selaku Tokoh Masyarakat peneliti menjadikannya informan karena Beliau mewakili masyarakat.

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang mendalam dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan tentang bagaimana kapasitas pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan tahun 2018.

Data-data primer tersebut ialah:

1. Wawancara langsung dengan informan.
2. Observasi di lokasi penelitian.

##### 2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh berupa data yang telah diolah dan diperoleh langsung dari tempat penelitian, yaitu Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, serta data yang berasal dari literatur buku-buku, jurnal-jurnal seputar permasalahan penelitian.

Data-data sekunder tersebut ialah:

1. Buku-buku.
2. Dokumen Profile Desa.
3. Jurnal Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelolah Dana Desa Di Desa Dompas Kecamtan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. (Rhara Sulistia, 2017 Universitas Riau Pekanbaru).

4. Jurnal Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangun Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). (Hafiz Lasmana, 2017 Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang).
5. Jurnal Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Tahun 2016. (Elma Julita, 2018 Universitas Riau)

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Moloeng (2008:58) teknik pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap. Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Wawancara

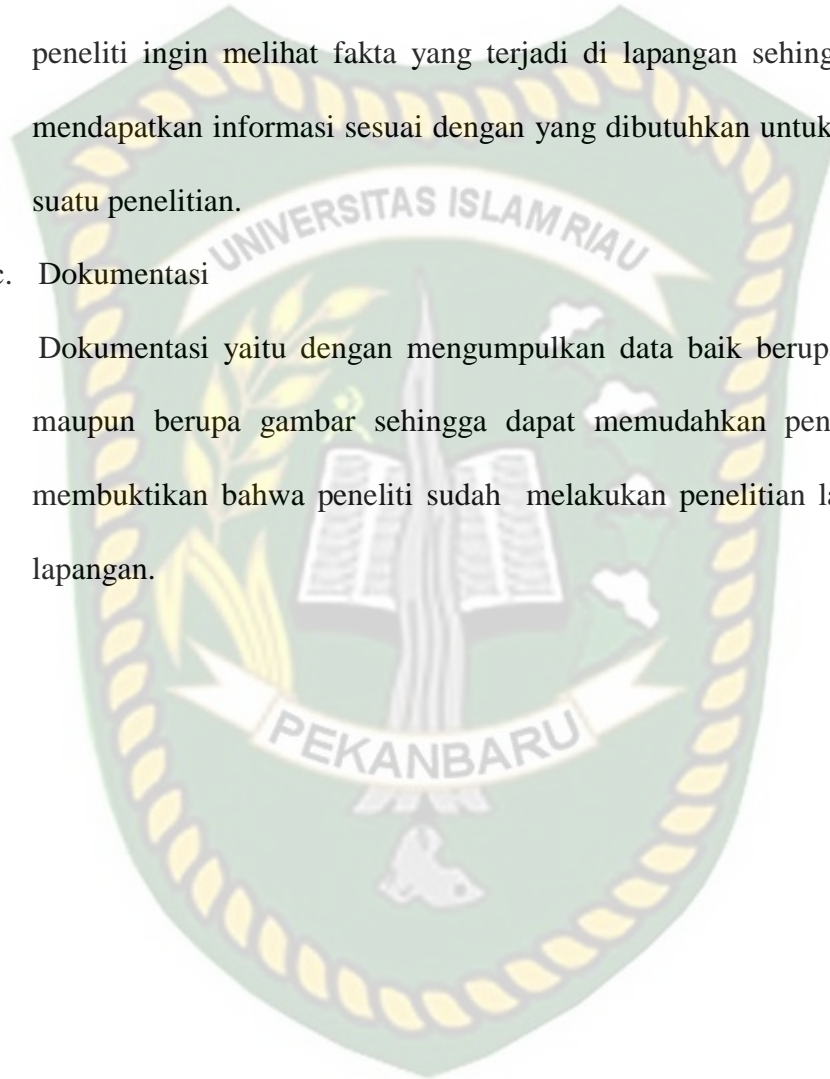
Wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada informan dengan permasalahan yang ada. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali informasi dari informan atau orang yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung atau pada objek penelitian. peneliti memilih teknik ini karena peneliti ingin melihat fakta yang terjadi di lapangan sehingga peneliti mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk kelanjutan suatu penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data baik berupa dokumen maupun berupa gambar sehingga dapat memudahkan peneliti dalam membuktikan bahwa peneliti sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.



## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data penelitian adalah pengelolaan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada, sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan. Lalu peneliti menganalisa data dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena social serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Miles dan Huberman (dalam Ariesto dkk 2010:10) mengingatkan bahwa data yang muncul dalam penelitian kualitatif berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Ariesto dkk 2010:11) adapun langkah-langkah dalam metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut :

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.



b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data yang utama adalah mempermudah peneliti memahami keseluruhan data, sehingga dapat membantu dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk menganalisis data. Sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci, sehingga diharapkan memberikan gambaran yang lebih jelas.

c. Penarik Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya ditunggangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentative.

## G. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angka Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Mingguann Tahun 2019-2021															
		Oktober- November 2019				Juni-Juli 2020				Oktober- November 2020				Desember- Januari 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X												
2	Seminar UP					X											
3	Perbaikan Hasil Seminar						X										
4	Penelitian Lapangan							X	X								
5	Pengelolaan Data									X	X						
6	Bimbingan Skripsi											X					
7	Ujian Skripsi													X			
8	Revisi dan pengesahan skripsi														X		
9	Penyerahan Skripsi															X	

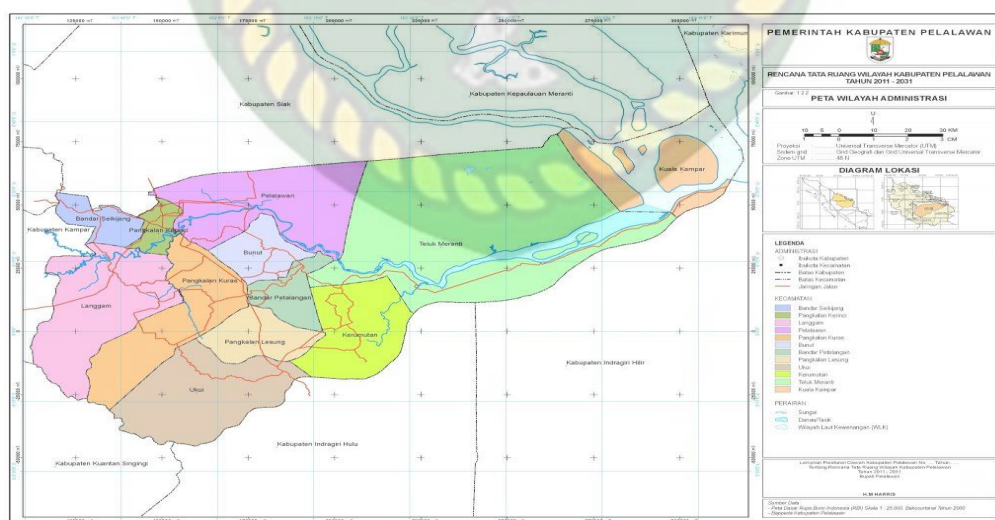
## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri Tahun 1761, dan mulai trekenal pada masa pemerintahan Sultan Syed Abdurrahman Fachrudin (1811-1822). Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940-1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomoe 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan.

#### Gambar IV.1 Peta Kabupaten Pelalawan



**Koordinat** : 0046,24 LU – 0024,34 LS dan 10130, 37 BT – 10321,36 BT

**Sumber** : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang paling dekat dengan Ibu Kota Provinsi Riau. Dan Kabupaten Pelalawan ini memiliki Luas Wilayah  $\pm$  13.924,94 Km<sup>2</sup>. Pada awal terbentuknya hanya terdiri atas 4 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Bunut, dan Kecamatan Kuala Kampar. Kemudian dalam masa perkembangannya, Kabupaten Pelalawan secara administrative terdiri dari 12 wilayah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan yaitu: Kecamatan Langgam, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kecamatan Ukui, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Kerumutan, Kecamatan Teluk Meranti, Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Kecamatan Bandar Sekijang, Kecamatan Bandar Petalangan.

Struktur wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93% dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperature udara agak tinggi. Kabupaten Pelalawan juga dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relative besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru, Pulau Ketam dan Pulau Untut. (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Tahun 2019*)

## **B. Gambaran Umum Desa Angkasa**

### **1. Sejarah Pembentukan Desa**

Desa angkasa terletak di kecamatan Bandar petalangan kabupaten pelalawan. Dahulunya desa angkasa ini merupakan sebuah RT 4 Dusun II Lubuk terap desa merbau. Karena desa merbau ini terlalu luas cakupannya, akhirnya desa merbau ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) daerah bagian yaitu Lubuk Mandian Gajah, Lubuk Terap dan Angkasa, dan pada waktu itu kecamatannya adalah Kecamatan Bunut. Dan setelah desa ini dimekarkan dengan melengkapi semua persyaratan yang ada maka kecamatannya berubah menjadi Kecamatan Bandar Petalangan. Berdasarkan SK Desa Persiapan No. 141/Pem-Des/III/2001 maka pada tanggal 19 Mei 2001 desa angkasa ini diresmikan menjadi desa persiapan. Kemudian ditahun berikutnya yaitu pada tanggal 24 Desember 2002 desa angkasa ini berubah menjadi desa definitive dengan berdasarkan SK Desa definitive No.16 Tahun 2002. Nama Angkasa ini sendiri diambil dari nama leluhur atau nenek moyang yang telah merintis tanah tapal perbatasan, antara tanah angkasa yang dulunya disebut tanah bunut dengan tanah pematang dan pangkalan kuras. Dan untuk mengenang jasa leluhur tersebut maka sekarang desa ini disebut dengan desa angkasa.

Desa Angkasa adalah desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatan yang ada di wilayah tersebut seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat

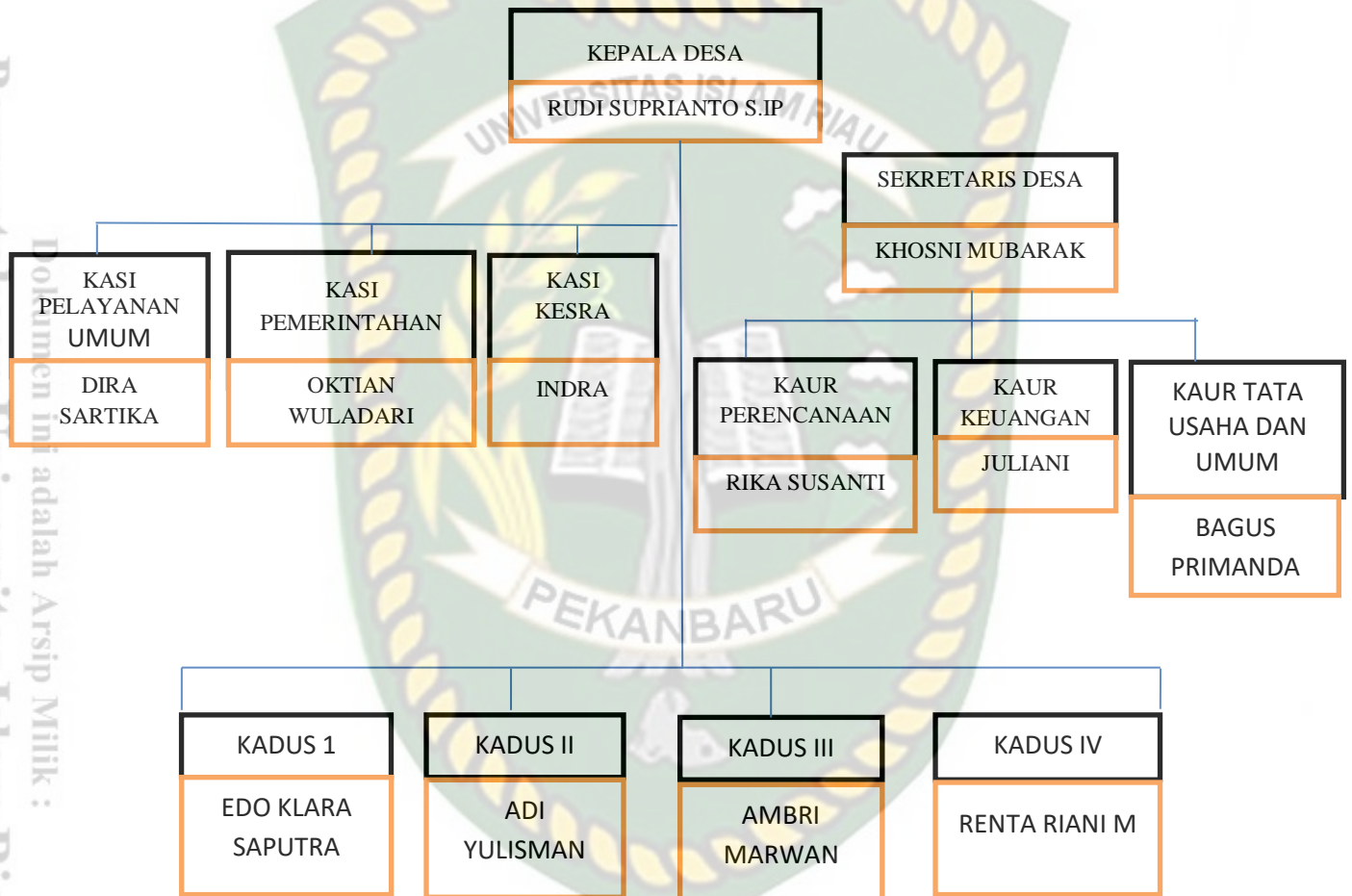
(Puskesmas), atau sarana kesehatan lainnya serta penduduknya mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat/PHBS.

Pendidikan kesehatan Berbasis Masyarakat melalui desa adalah pendidikan kesehatan yang dalam proses pembelajarannya sebanyak mungkin sehingga memanfaatkan potensi desa, serta melibatkan masyarakat setempat, yang menggunakan system pemberdayaan masyarakat secara mandiri.

Kader desa harus terus ditingkatkan kemampuannya secara mandiri, karena peran kader dipandang sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dibidang kesehatan, dan kesejahteraan oleh karena itu untuk meningkatkan keterampilan kader kita harus membekali mereka dengan pengetahuan yang salah satunya adalah mengadakan pertemuan rutin kader desa yang diadakan satu bulan sekali berdasarkan wilayah kerja atau desa masing-masing, sehingga masalah ataupun potensi yang ada di desa lebih dapat diperhatikan.

## 2. Struktur Pemerintah Desa Angkasa

Gambar IV.II Struktur Pemerintah Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Periode 2014-2020.



Sumber : Kantor Desa Angkasa

Nurcholis (2011:74) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tugas kepala desa mempunyai kewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

Nurcholis (2011:75) Kepala desa berhenti karena (1) meninggal dunia; (2) permintaan sendiri; atau (3) diberhentikan. Kepala desa diberhentikan karena :

1. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat baru
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.
4. Dinyatakan melanggar sumpah /janji jabatan.
5. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa atau melanggar larangan bagi kepala desa.

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/wali



kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan diatas kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris diisi dari pegawai yang memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Berpendidikan paling rendah lulus SMA atau sederajat.
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran.
- d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan perencanaan.
- e. Memahami social budaya masyarakat setempat.

### **3. Letak Geografis Desa Angkasa**

letak geografis desa Angkasa terletak di Kecamatan Bandar Petalangan dengan ketinggian 60-100 meter diatas permukaan air laut. Pada dasarnya desa Angkasa terdapat kesamaan dengan desa di wilayah Kecamatan Bandar Petalangan lainnya, baik geografi, penduduk maupun kondisi lain pada umumnya. Adapun desa Angkasa mempunyai batas-batas pemerintahan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Sorek Dua dan Balam Merah.
2. Sebelah Selatan : Desa Lubuk Terap.
3. Sebelah Timur : Desa Sialang Godang dan Desa Sialang Bungkok.
4. Sebelah Barat : Kelurahan Sorek Satu.

Sedangkan Luas Desa Angkasa 32 KM dengan pemanfaatan lahan dalam sebagai berikut :

1. Permukiman : 320 Hektar
2. Persawahan : 0 Hektar
3. Perkebunan : 530 Hektar
4. Makam : ½ Hektar
5. Perkarangan : 220 Hektar
6. Perkantoran : 2 Hektar
7. Prasarana umum lainnya : 36 Hektar



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian perlu dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Hal-hal yang akan dijelaskan adalah mengenai jenis kelamin, usia, dan pendidikan informan.

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Untuk lebih jelas identitas informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Informan	Presentasi %
1	Laki-laki	5	90%
2	Perempuan	1	10%
	Jumlah	6	100%

*Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin informan sangat di dominasi oleh kaum Laki-laki. Dalam penelitian ini terdapat 6 (enam) orang informan, yang terdiri dari 5 laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

##### 2. Usia Informan

Kemudian akan dijelaskan identitas informan berdasarkan kelompok umur. Sebuah penelitian tentu tidak memberikan batasan usia informan dalam

melakukan penelitiannya. Namun kebanyakan bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Untuk lebih jelas identitas informan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel V.II. Identitas Informan Berdasarkan Usia**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Presentase %
1	20-30	3	50%
2	35-49	3	50%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui identitas informan berdasarkan Usia adalah berusia 20-30 tahun yakni 3 orang atau 50%, dan selanjutnya umur 35-49 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau 50%. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini informan yang dimintai pendapatnya berada pada kategori umur dewasa dan produktif dalam berfikir.

### 3. Tingkat Pendidikan Informan

Selanjutnya identitas pada penelitian ini juga terdapat identitas berupa Tingkat Pendidikan, maka table mengenai informasi Tingkat Pendidikan Informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel V.III : Identitas Informan Bedasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1	Sekolah Dasar (SD)	1	10%
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-%
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	75%
4	Strata Satu (S.1)	2	15%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2020

## **B. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angka Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan**

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana tanggapan–tanggapan Informan terhadap indikator-indikator penelitian Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dengan melakukan wawancara kepada setiap Informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kapasitas Organisasi Horton, et.al (dalam Mislaili Dkk 2019:4) indikator-indikator tersebut adalah :

1. Sumberdaya Manusia
  - Sumberdaya manusia
  - Infrastruktur
  - Teknologi dan keuangan
2. Manajemen
  - Kepemimpinan
  - Program dan manajemen proses
  - Jaringan kerjasama

Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara kepada 6 orang informan. Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian.

## 1. Sumberdaya

Menurut Horton (dalam Hennidar 2019:35) dalam komponen sumber daya hal yang paling penting adalah prosedur perekrutan, ketersediaan, dan kompetensi pegawai, serta pelatihan pegawai. Horton (dalam Clara 2020:20) mengungkapkan bahwa penting bagi organisasi untuk dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan dan teknologi.

### 1.1 Sumberdaya manusia

Menurut Grindle (dalam Ningrum 2018:5) menjelaskan bahwa dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Hal ini, dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap pihak yang terkait.

Sumberdaya manusia sebagaimana dijelaskan diatas juga diperlukan dalam kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan. Sementara itu dari hasil wawancara terhadap Bapak Mukhtarius tentang sumberdaya manusia adalah sebagai berikut :

*“Sumberdaya manusia untuk aparatur desa angkasa ini sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, dan saya melihat di desa angkasa sumberdaya manusia cukup memadai, saya juga melihat minimnya tingkat pendidikan sumberdaya manusia sehingga keahlian di*

*bidang pengelolaan masih terlihat kekurangannya.”* (Wawancara Mukhtarius, Camat, Rabu 30 September 2020 , 11:29 WIB)

Berdasarkan wawancara camat diatas dapat dikatakan sumber daya manusia yang ada di desa cukup memadai dalam arti jumlah namun walaupun jumlahnya cukup memadai dari segi kualitasnya masih minim.

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan Bapak Rudi Suprianto adalah sebagai berikut :

*“Kapasitas perangkat desa untuk saat ini sudah cukup memadai, karena di desa angkasa ini memiliki perangkat desa sebanyak 11 orang. Terdiri dari 3 kasi, 3 kaur, 4 orang kadus dan 1 orang sekdes. Proses rekrutmennya pun melalui proses perbandingan sesuai dengan aturan yang ada yaitu sesuai Permendagri No 83 Tahun 2015 (Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa).”*(Wawancara, Rudi Suprianto, Kepala Desa, Selasa 29 September 2020, 14:12 WIB)

Berdasarkan wawancara kepala desa diatas dapat dikatakan sumber daya manusia yang ada di desa angkasa cukup memadai karena memiliki perangkat desa sebanyak 11 orang dan proses rekrutmennya pun sesuai Permendagri No 83 Tahun 2015. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Bapak Khosni adalah sebagai berikut :

*“Saat ini pemerintah desa angkasa di isi oleh orang-orang yang cukup mumpuni dan diisi oleh tenaga-tenaga muda.”* (Wawancara, Khosni Mubarak, Sekretaris Desa, Senin 28 September 2020 , 10:11 WIB)

Berdasarkan wawancara sekretaris diatas dapat dikatakan sumber daya manusia di desa angkasa di isi oleh orang-orang yang cukup mumpuni dan di isi oleh tenaga-tenaga muda.

Kemudian dilanjutkan wawancara terhadap Ibu Juliani Tentang sumberdaya manusia adalah sebagai berikut ;

*“Sumberdaya manusianya cukup, dari segi kemampuan memang masih terdapat kendala-kendala karena murni manusia. Kendala itu sebenarnya bisa diminimalisir selagi kita benar-benar mengikuti prosedur yang berlaku. Biasanya kendalanya itu hanya bersifat teknis saja.”* (Wawancara, Juliani, Kaur Keuangan, Senin 28 September 2020, 11:20 WIB)

Berdasarkan wawancara kaur keuangan diatas dapat dikatakan sumberdaya manusia di desa angkasa cukup dan selama mereka mematuhi dan mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku maka kendala atau masalah dalam melaksanakan tugas itu dapat diminimalisir.

Selanjutnya wawancara terhadap Bapak Edo Klara Saputra Tentang Sumberdaya Manusia adalah sebagai berikut:

*“Kapasitas Sumberdaya manusia aparatur desa sejauh yang saya ketahui didesa angkasa cukup , ditambah dengan peremajaan aparatur desa, yang cukup membuat aparatur desa lebih kreatif, dan inovatif ditambah dengan aparatur yang masih muda dan mempunyai semangat tinggi.”*(Wawancara, Edo Klara Saputra, Kepala Dusun, Senin 28 September 2020, 13:00 WIB)

Selanjutnya yang terakhir wawancara dari Bapak Saner adalah sebagai berikut :

*“ Saya kira sejauh ini cukup. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi dalam kemampuan pengelolaan alokasi dana desa.”* (Wawancara, Saner, Tokoh Masyarakat, Senin 28 September 2020, 15:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan diatas yang peneliti lakukan mengenai indikator sumberdaya manusia didapati ada perbedaan. Ada informan yang mengatakan bahwa sumberdaya manusia dari segi jumlah sudah cukup memadai namun dari segi kualitas kemampuan dalam melaksanakan tugas masih terdapat kendala yang pertama mengoperasikan komputer yang kedua pemahaman orang itu sendiri terhadap



peraturan mengenai keuangan banyak yang tidak menguasai sehingga terjadinya keterlambatan.

Berdasarkan pengamatan peneliti berkaitan dengan kinerja sumberdaya manusia di desa angkasa kurang responsive, kurang memahami meninjau tingkat pendidikan yang hanya rata-rata hanya SMA. Meskipun masih terdapat kendala namun mereka masih mampu dan memiliki cara untuk mengatasinya, salah satunya adalah apabila ada salah satu dari mereka yang tidak mengerti akan suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka mereka akan meminta bantuan kepada rekan kerja untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya.

## 1.2 Infrastruktur

Menurut Strling (dalam Ningrum 2018:5) dikatakan dalam organisasi kapasitas infrastruktur dan proses yang membantu dalam mengelola elemen organisasi terkait dengan operasi sehari-hari. Misalnya : kebijakan, prosedur, teknologi informasi. Di dalam kapasitas, tantangan yang paling penting bahwa peserta diidentifikasi berhubungan langsung dengan teknologi informasi.

Infrastruktur sebagaimana dijelaskan diatas juga diperlukan dalam kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mukhtarius adalah sebagai berikut :

*“ Infrastruktur sudah ada, artinya mulai dari kantor sudah ada.”*

(Wawancara, Mukhtarius, Camat, Rabu 30 September 2020, 11:29 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan camat diatas dapat dikatakan bahwa Infrastruktur di desa sudah ada.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rudi Suprianto adalah sebagai berikut : *“kalau infrastruktur sudah ada seperti, kantor. Kondisi ruangan dan bangunan tertata rapi dan terawat.”* (Wawancara, Rudi Suprianto, Kepala Desa, Selasa 29 September 2020, 14:12 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa diatas dapat dikatakan bahwa infrastruktur sudah ada mulai dari kantor dengan ruangan yang tertata rapi dan bangunan yang terawat.

Hal yang berbeda disampaikan Bapak Khosni adalah sebagai berikut :

*“ saat ini infrastruktur yang ada sudah memadai hanya saja masyarakat kurang kesadaran dalam menjaga infrastruktur yang ada.”* (Wawancara, Khosni Mubarak, Sekretaris Desa, Senin 28 September 2020, 10:11 WIB)

Berdasarkan wawancara beserta jawaban singkat dengan sekretaris desa dapat dikatakan infrastruktur yang ada di desa sudah memadai tetapi masih ada masyarakat yang kurang kesadaran dalam menjaga infrastruktur.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Juliani mengenai infrastruktur yang ada di desa adalah sebagai berikut :

*“ untuk infrastruktur sudah ada.”* (Wawancara, Juliani, Kaur Keuangan, Senin 28 September 2020, 11:20 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan kaur keuangan diatas dapat dikatakan untuk infrastruktur sudah ada.

Kemudian Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Edo Klara Saputra adalah sebagai berikut :

*“ infrastruktur menurut saya sudah memadai contohnya sudah adanya kantor desa.”* ( Wawancara, Edo Klara Saputra, Kepala Dusun, Senin 28 September 2020, 13:00 WIB)

Selanjutnya terakhir berdasarkan wawancara dengan Bapak Saner adalah sebagai berikut :

*“infrastruktur desa angkasa untuk saat ini menurut saya sudah memadai.”*

(Wawancara, Saner, Tokoh Masyarakat, Senin 28 September 2020, 15:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan diatas yang peneliti lakukan mengenai indikator infrastruktur didapati infrastruktur sudah memadai artinya mulai dari prasarana yaitu kantor desa, sarana ada laptop, printer. Kemudian ada juga informan yang mengatakan infrastruktur sudah memadai hanya saja masyarakat kurang kesadaran dalam menjaga infrastruktur tersebut.

### **1.3 Teknologi dan sumberdaya keuangan**

Dalam organisasi, kapasitas keuangan merupakan aspek yang harus selalu ada dalam berdirinya suatu organisasi . Kapasitas keuangan dapat disamakan dengan ketersediaan anggaran. Tanpa adanya anggaran yang memadai, organisasi sulit untuk dapat melakukan aktivitasnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mencapai tujuan. Selanjutnya kapasitas teknologi sebagai kemampuan organisasi untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan instansi lain, baik didalam maupun diluar masyarakat, hal ini menjadi penting karena mendukung keberhasilan sebuah organisasi. Aspek kapasitas ini mewakili hubungan eksternal yang penting yang ingin dikembangkan dan dikelola oleh organisasi. Organisasi

ini membangun kapasitas dengan menjalin jaringan dengan organisasi yang berbasis masyarakat, perusahaan swasta, pendidikan dan aktor politik. Dengan demikian, organisasi ini lebih mampu melakukan penggalangan dana untuk proyek dan programnya.

Teknologi, dan sumberdaya keuangan sebagaimana dijelaskan diatas juga diperlukan dalam kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Muhktarius adalah sebagai berikut :

*“teknologi itu menyesuaikan dengan kondisi artinya dengan perkembangan teknologi yang ada pemerintahan desa bisa memanfaatkan teknologi untuk membantu daripada kelancaran pengelolaan, khususnya dalam pengelolaan anggaran alokasi dana desa. Kemudian untuk sumberdaya keuangan sudah mampu memberikan tunjangan kepada pemeritah desa itu sendiri.”* (Wawancara, Mukhtarius, Camat, Rabu 30 September 2020, 11:29 WIB )

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan teknologi itu menyesuaikan dengan kondisi artinya pemerintah zaman sekarang sudah bisa memanfaatkan teknologi demi kelancaran pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian untuk sumberdaya keuangan dikatakan sudah mampu memberikan tunjangan kepada pemerintah desa itu sendiri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Rudi Suprianto adalah sebagai berikut :

*“teknologi yang digunakan dalam pengelolaan dana desa saat ini desa menyediakan fasilitas IT seperti komputer dan printer. Kemudian untuk sumberdaya keungan sudah memadai sampai saat ini Alhamdulillah sudah bisa membayar gaji/tunjangan kepada pemerintah desa.”*(Wawancara, Rudi Suprianto, Kepala Desa, Selasa 29 September 2020, 14:12 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan teknologi dalam pengeolaan alokasi dana desa saat ini desa mnyediakan komputer dan printer dan untuk sumberdaya manusia sampai saat ini sudah bisa membayar gaji/tunjangan pemerintah desa. Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Khosni mengenai teknologi adalah sebagai beruit :

*“ mengenai teknologi itu sendiri telah tercukupi dan sumberdaya keuangan memadai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan operasional bina keluarga lansia.”* (Wawancara, Khosni Mubarak, Sekretaris Desa, Senin 28 September 2020, 10:11 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Selanjutnya mengenai teknologi sendiri sudah tercukupi dan untuk sumberdaya keungan sudah memadai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan operasional bina keluarga lansia.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Juliani mengenai teknologi adalah sebagai berikut :

*“Teknologi dalam kaitan pengelolaan alokasi dana desa di desa angkasa saat ini belum memadai. Komputer dikantor sering rusak kadang saya harus membawa laptop sendiri dari rumah. Sedangkan untuk sumberdaya keuangan memadai untuk tunjangan pemerintah desa dan disana juga ada uang untuk rapatnya.”* ( Wawancara, Juliani, Kaur Keuangan, Senin 28 September 2020, 11:20 WIB)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Juliani diatas dapat dikatakan teknologi belum memadai. komputer sering rusak dan membawa laptop sendiri dari rumah. Sedangkan untuk sumberdaya keuangan memadai mulai dari tunjangan pemerintah desa sampai uang rapatnya juga ada.

Selanjutnya yang wawancara dengan Bapak Edo Klara Saputra adalah sebagai berikut :

*“teknologi menurut saya masih kurang karna komputer yang saat ini pun sering rusak saya juga melihat kaur keuangan membawa laptop sendiri dari rumah, kalau untuk koneksi internet disini sudah bagus tapi harus pakai telkomsesl ya. Kemudian untuk sumberdaya keuangan saya rasa cukup lah.”* (Wawancara, Edo Klara Saputra, Kepala Dusun, Senin 28 September 2020, 13:00 WIB)

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Saner berkaitan dengan teknologi dan sumberdaya keuanggan adalah sebagai berikut :

*“teknologi saya kurang tau ya lebih baik tanyakan kepada orang yang bersangkutan. saya juga jarang sekali masuk kedalam kantor kalau tidak ada kepentingan.”* (Wawancara, Saner, Tokoh Masyarakat, Senin 28 September 2020, 15:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan diatas yang peneliti lakukan mengenai sub indikator teknologi dan sumberdaya ada yang mengatakan keuangan bahwa untuk teknologi masih kurang, komputer yang saat ini pun sering rusak dan harus membawa laptop sendiri dari rumah. Sedangkan sumberdaya keuangan memadai dan alhamdulillah sudah bisa membayar gaji/tunjangan pemerintah desa dan juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan operasional bina keluarga lansia serta ada juga uang untuk rapatnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti berkaitan dengan teknologi dan sumberdaya keuangan belum memadai meskipun untuk gaji/tunjangan dan kegiatan-kegiatan bisa telaksana namun untuk teknologi masih belum memadai

melihat kondisi komputer yang sering rusak sehingga harus membawa laptop sendiri dari rumah. Belum ada upaya kepala desa dalam memperbaiki terkait kerusakan tersebut.

## **2. Manajemen**

Menurut Siswanto (2005:24) manajemen adalah ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Manajemen yang dimaksud adalah kepemimpinan, program dan manajemen proses, jaringan kerjasama.

### **2.1 Kepemimpinan**

Lusthaus ( dalam Ningrum 2018:4) Kepemimpinan dalam organisasi memegang peranan sangat penting dalam mengarahkan tujuan organisasi. Kepemimpinan diartikan sebagai *“refer to all those activities that set the course for the organization and help it stay on course servis of its mission.”* Kepemimpinan berkaitan dengan visi organisasi, yaitu yang dapat menciptakan suatu organisasi memiliki ciri khas tersendiri. Hal tersebut merupakan proses menyusun tujuan organisasi secara jelas dan mengarahkan usaha para bawahan agar dapat mencapai tujuan organisasi.

Menurut Likert (dalam Hennidar 2019:36) pemimpin dapat berhasil jika bergaya *participative management*. Gaya ini menjelaskan bahwa pemimpin akan berhasil jika berorientasi terhadap bawahan dan mendasarkan pada komunikasi. Selain itu semua pihak dalam organisasi baik itu bawahan maupun pemimpin menerapkan hubungan yang mendukung atau *supportive relationship*.

Kepemimpinan yang sebagaimana dijelaskan diatas juga diperlukan dalam kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Angka Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan indikator kepemimpinan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mukhtarius adalah sebagai berikut :

*“kepemimpinan itu sudah ada, saya kira mengikuti peraturan yang ada. Kalau ada ketentuannya, ada aturannya manajerial yang tepat itu semua dapat berjalan dengan baik. Artinya kepemimpinan itu ada beberapa pedoman yang harus dipenuhi baik syarat yang mutlak. Mungkin berupa pemberdayaan masyarakat, pembangunan artinya pemimpin itu relatif. Artinya target ketercapaian program pembangunan dengan kemampuan kepemimpinan itu tolak ukurnya tidak sama antara orang perorang.”* (Wawancara, Mukhtarius, Camat, Rabu 30 September 2020, 11:29 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa kepemimpinan itu sudah mengikuti ketentuan yang ada. Apabila ada manajerial yang tepat maka dapat berjalan dengan baik. Mukhtarius juga mengatakan kepemimpinan itu tolak ukurnya tidak sama antara orang perorang.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Rudi Suprianto adalah sebagai berikut :

*“ saya mengedepankan komunikasi yang baik dengan semua personil. Saya juga memberikan motivasi kepada personil agar melaksanakan tugas dan tanggungjawab demi mencapai tujuan yang telah disusun. Tetapi masih ada personil yang bandel. Ada yang tidak menaati peraturan waktu datang ke kantor sesuka hati saja jam berapa.”* (Wawancara, Rudi Suprianto, Kepala Desa, Selasa 29 September 2020, 14:12 WIB)



Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan kepala desa sudah berupaya untuk mengedepankan komunikasi yang baik, memberikan motivasi kepada personil tetapi masih ada saja personil yang bandel tidak taat peraturan datang kekantor terlambat.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Khosni adalah sebagai berikut :

*“kepala desa dalam hal ini berperan sebagai sarana penerima aspirasi masyarakat yang tentu saja berkat pimpinan beliau lah ide-ide masyarakat bisa terealisasi.”* (Wawancara, Khosni Mubarak, Sekeretaris Desa, Senin 28 September 2020, 10:12)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan kepala desa berperan sebagai sarana penerima aspirasi masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan Juliani adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“ untuk saat ini saya melihat kepemimpinan kepala desa belum tegas sehingga banyak perangkat desa yang sering datang kekantor sesuka hati jam berapa saja, kemudian saya juga pernah melihat kepala desa sendiri tidak masuk kantor padahal sedang jam dinas.”* (Wawancara, Juliani, Kaur Keuangan, Senin 28 September 2020, 11:20)

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Edo adalah sebagai berikut :

*“dalam pengelolaan alokasi dana desa kepala desa kurang baik beliau jarang memantau dan memotivasi dan dari segi kedisiplinan juga masih kurang.”* (Wawancara, Edo Klara Saputra, Kepala Dusun, Senin 28 September 2020, 13:00 WIB)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Saner ia mengatakan :

“saat ini saya tidak tahu, karna saya sendiri jarang ke kantor desa.”  
(Wawancara, Saner, Tokoh Masyarakat, senin 28 September 2020, 15:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan diatas yang peneliti lakukan mengenai sub indikator kepemimpinan didapati ada perbedaan. Ada informan yang mengatakan kepemimpinan itu sudah mengikuti ketentuan yang ada, Kemudian informan juga mengatakan kepala desa jarang memantau dan kurang disiplin. Contohnya datang ke kantor tidak tepat waktu.

Berdasarkan pengamatan peneliti berkaitan dengan kepemimpinan di desa angkasa belum efektif. melihat masih ada aparatur desa yang kurang disiplin bahkan kepala desa sendiri pun tidak hadir ke kantor saat jam dinas. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya ketegasan dari pemimpin itu sendiri. Jadi perlu adanya kemampuan pemimpin dalam memotivasi perangkat desa. Kepemimpinan memegang peran yang sangat penting dalam mengarahkan tujuan organisasi.

## **2.2 Program dan manajemen proses**

Program dan manajemen proses dapat diartikan sebagai mekanisme yang menunjukkan bahwa para staf baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi dapat melaksanakan pekerjaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen proses diartikan sebagai berikut : “ *the task oif alingning and integrating the various practices and cultures of different segmen of an organization through the introduction of common system and operations that*

*apply uniformly to all segment of the organization.*” Lusthaus (dalam Ningrum 2018:5)

Dalam manajemen proses ini setiap manusia dengan tugas dan pekerjaannya mengadakan interaksi dengan pihak-pihak, sesuai dengan system dan prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Manajemen proses dalam organisasi terjadi dalam setiap level organisasi, mulai dari organisasi pada level atas sampai level yang paling bawah. Manajemen proses ini meliputi kegiatan antara lain : perencanaan. Pengorganisasian, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi.

Program dan manajemen proses yang sebagaimana dijelaskan diatas juga diperlukan dalam kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan. Berdasarkan indikator program dan manajemen proses mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mukhtarius.

Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

*“program yang dibuat bermacam-macam ada study banding, bagian sifatnya mendukung saya kira program yang paling tepat sasaran itu adalah program yang sifatnya penguatan sistem, penguatan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di sana melalui pelatihan penataran, kegiatan-kegiatan musyawarah dan tercermin disitu kemampuan orang. Begitupun dengan manajemen proses, semua sama setiap desa mulai dari perencanaannya hingga disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa setelah itu baru dilaksanakan program tahun berjalan oleh kepala desa dan pemerintah disana.”* (Wawancara, Mukhtarius, Camat, Rabu 30 September 2020, 11:29 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan program yang dibuat bermacam-macam, yang paling tepat sasaran yaitu program yang sifatnya penguatan system, penguatan sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Kemudian dengan manajemen proses, mulai dari perencanaan hingga disahkan oleh BPD baru dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat didesa.

Selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Rudi Suprianto adalah sebagai berikut :

*“program-program untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah. Contohnya kunjungan kerja , study banding ke daerah yang memiliki prestasi di tingkat nasional, pelatihan-pelatihan dan sosialisasi contohnya pelatihan untuk menambah skill, sosialisasi kaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba, pelatihan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa. Selanjutnya siklus pengelolaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.”* (Wawancara, Rudi Suprianto, Kepala Desa, Selasa 29 September 2020, 14:12 WIB)

Hal yang sama dengan wawancara Bapak Khosni Mubarak adalah sebagai berikut :

*“untuk program sendiri ada pelatihan contohnya peningkatan kerja aparatur desa dll. Untuk siklus pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari beberapa bagian mulai dari melibatkan pihak-pihak pusat, kecamatan, hingga masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.”* (Wawancara, Khosni Mubarak, Sekretaris Desa, Senin 28 September 2020, 10:11 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan untuk peningkatan kapasitas atau peningkatan kerja perlu adanya pelatihan-pelatihan. Sedangkan untuk siklus pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Ibu Juliani adalah sebagai

berikut :

*“ada pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa, evaluasi kinerja aparatur pemerintah desa, pembinaan aset desa, pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Siklus pengelolaan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.”* (Wawancara, Juliani, Kaur Keuangan, Senin 28 September 2020, 11:20 WIB)

Hal yang sama dikatakan Bapak Edo Klara Saputra adalah sebagai berikut

:

*”untuk program memang ada yang study banding, pelatihan, tetapi tidak terlihat penerapannya, salah satunya pelatihan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa. Masih ada perangkat desa yang belum mengerti akan tugas dan fungsi masing-masing.”* Begitulah jawaban singkat dari Bapak Edo. (Wawancara, Edo Klara Saputra, Kepala Dusun, Senin 28 September 2020, 13:00 WIB)

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Saner adalah sebagai

berikut :

*“saya sendiri pun jarang memantau kekantor desa itu sendiri. Untuk siklus saya tidak mengerti ya karna kepala desa tidak melibatkan saya.”* (Wawancara Hari/Tanggal/Jam : Senin 28 September 2020 /15:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan diatas yang peneliti lakukan mengenai sub indikator program dan manajemen proses didapati ada perbedaan. Ada informan yang mengatakan program-program yang dibuat itu bermacam-macam yang paling tepat sasaran yaitu program yang sifatnya penguatan system, penguatan sumberdaya dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian untuk manajemen proses dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Berbeda yang dikatakan oleh Bapak Saner beliau mengatakan kepala desa tidak melibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti berkaitan dengan program dan manajemen proses masih terlihat kekurangan. Salah satunya untuk program. Kepala desa memang memberikan pelatihan kepada aparatur desa tetapi tidak diterapkan dengan baik. Masih ada yang tidak mengerti akan tugas dan fungsi masing-masing. Peneliti juga pernah melihat seseorang mahasiswa meminta data untuk penelitian namun ada salah seorang perangkat desa meminta uang demi kelancaran urusan tersebut. Kemudian tokoh masyarakat tidak mengetahui siklus pengelolaan alokasi dana desa dikarenakan tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Jadi bisa dikatakan pemerintah desa kurang transparan terhadap masyarakat. Contohnya tidak ada banner yang dipasang tentang APBDes sehingga masyarakat tidak mengetahui jumlah dana yang diterima desa dan penggunaannya.

### **2.3 Jaringan kerjasama**

Menurut Wayne E. Baker (dalam Emmy 2015:5) jaringan kerjasama adalah proses yang aktif dalam mengelola hubungan-hubungan yang produktif secara personal maupun organisasi.

Menurut Grindle (dalam Hennidar 2018:38) semakin baik kemampuan organisasi dalam berkoordinasi dengan organisasi lain, semakin baik kerjasama yang terjalin sehingga meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan fungsinya.

Jaringan kerjasama sebagaimana dijelaskan diatas juga diperlukan dalam kapasitas pemerintah desa dalam pengeolaan alokasi dana desa di desa Angka Kecamatan Bandar Petalangan. Berdasarkan indikator jaringan kerjasama mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mukhtarius adalah sebagai berikut :

*“kalau didesa itukan sudah ada kegiatan dan mereka menunjuk tim TPK nya, sudah ada musyawarah juga. Kalau keterlibatan masyarakat jelas ada karna sifatnya swakelola.”* (Wawancara, Mukhtarius, Camat, Rabu 30 September 2020, 11:29 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan ,pihak desa akan menunjuk tim TPK dan kemudian musyawarah, masyarakat jelas terlibat karna swakelola. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Bapak Rudi Suprianto adalah sebagai berikut :

*”kepala desa dan BPD memag harus bersinergi dalam membangun desa dan mengelolaa ADD. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan penyelenggranaan pemerintah desa pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat harus terlebih dahulu memiliki rencana musyawarah rencana kerja pemerintah desa.”* (Wawancara, Rudi Suprianto, Kepala Desa, Selasa 29 September 2020, 14:12 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan kepala desa menjalin kerjasama dengan BPD harus bersinergi dalam membangun desa dan mengelola ADD. Sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan kepada masyarakat harus terlebih dahulu harus musyawarah rencana kerja pemerintah desa. Selanjutnya peneliti mewawancarai Khosni Mubarak adalah sebagai berikut :

*“ didalam hal ini pihak pemerintah desa sangat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain, terutama komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dan lain-lain guna untuk koordinasi dalam pengelolaan dana desa.”* (Wawancara, Khosni Mubarak, Sekretaris Desa, Senin 28 September 2020, 10:11 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan pemerintah desa sangat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain guna untuk berkoordinasi dalam pengelolaan dana desa. Selanjutnya tanggapan dari Ibu Juliani adalah sebagai berikut :

*“kerjasama antar desa cukup baik,walaupun masih ada perbedaan pendapat dan juga tidak hadir dalam pertemuan rapat. Kemudian kerjasama degan pihak ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya. Pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa.”* (Wawancara, Juliani, Kaur Keuangan, Senin 28 September 2020, 11:20 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan kerjasama antar desa cukup baik, tetapi masih ada saja perbedaan pendapat dan masih ada juga yang tidak hadir saat dalam pertemuan rapat. Kemudian pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa.

Selanjutnya hasil tanggapan dari Bapak Edo Klara Saputra adalah sebagai berikut mengatakan :

*“kerjasama pemerintah desa dengan pihak lain sudah ada sebelum dana diluncurkan dengan tujuan agar dana tersebut tepat sasaran.”* (Wawancara, Edo Klara Saputra, Kepala Dusun, Senin 28 September 2020, 13:00 WIB)

Hal yang berbeda disampaikan oleh Bapak Saner adalah sebagai berikut :



*“ sejauh ini kerjasama mungkin ada tetapi tidak melibatkan masyarakat karna saya sendiri pun tidak tau.”* (Wawancara, Saner, Tokoh Masyarakat, Senin 28 September 2020, 15:00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang telah ditetapkan diatas yang peneliti lakukan mengenai sub indikator jaringan kerjasama didapati masih adanya kendala yaitu masih adanya perbedaan pendapat. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena dengan adanya kerjasama dengan desa sekeliling ataupun pihak lain bisa mempercepat pertumbuhan dan kemajuan desa. Seharusnya perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Berdasarkan hasil pengamatan diatas yang peneliti lakukan mengenai indikator jaringan kerjasama, peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam hubungan kerjasama masih ada perbedaan pendapat antara aparat desa dengan tokoh masyarakat. Kepala Desa mengatakan melibatkan masyarakat sementara masyarakat mengatakan tidak mengetahui apa-apa.

Dengan demikian berdasarkan uraian dari beberapa indikator diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa angkasa kecamatan Bandar petalangan kabupaten pelalawan adalah berkaitan dengan kinerja sumberdaya manusia di desa angkasa kurang responsive, kurang memahami meninjau tingkat pendidikan yang hanya rata-rata SMA. Kemudian mengenai indikator infrastruktur sudah memadai artinya mulai dari prasarana yaitu kantor desa, hanya saja masyarakat kurang kesadaran dalam menjaga infrastruktur tersebut. Kemudian berkaitan dengan indikator teknologi

dan sumberdaya keuangan belum memadai. memang sejauh ini untuk gaji/tunjangan bisa terpenuhi namun untuk teknologi belum, masih ada computer yang rusak sehingga harus membawa laptop dari rumah. Kemudian belum ada upaya kepala desa dalam memperbaiki terkait kerusakan tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan indikator kepemimpinan di desa belum efektif. melihat masih ada aparatur desa yang kurang disiplin bahkan kepala desa sendiri tidak hadir dikantor saat jam dinas. Jadi perlu adanya kemampuan pemimpin dalam memotivasi perangkat desa sehingga bisa tercapai sebuah tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya mengenai indikator program dan manajemen proses masih terlihat kekurangan. Salah satunya untuk program, kepala desa memberikan pelatihan kepada aparatur desa tetapi tidak diterapkan dengan baik. Terakhir mengenai indikator jaringan kerjasama belum berjalan dengan baik masih ada perbedaan pendapat dan masih ada yang tidak hadir saat pertemuan rapat.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan belum memiliki kapasitas yang optimal ini berdasarkan kepada analisis dua indikator sumberdaya manusia, infrastruktur, teknologi dan keuangan kemudian manajemen kepemimpinan, program manajemen proses, jaringan kerjasama.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya sumberdaya aparatur desa masih perlu berbagai pelatihan dan tingkat pendidikan yang memadai sehingga terciptanya pengelolaan alokasi dana desa secara efektif, efisien, dan responsive. Selanjutnya infrastruktur, teknologi dan keuangan itu sendiri sudah cukup. Namun, terkait beberapa tata tertib pelaporan belum terlaksana dengan baik masih ada keterlambatan. Selanjutnya kepemimpinan yang dilakukan belum efektif, melihat masih ada aparatur desa yang kurang disiplin bahkan kepala desa jarang ke kantor disaat jam dinas. Hal ini terjadi karena kurangnya ketegasan pemimpin itu sendiri. Kemudian selanjutnya program-program yang dibuat itu bermacam-macam tetapi masih ada saja aparatur desa yang belum tau fungsi dan tugasnya, manajemen proses yang dimulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian yang

terakhir jaringan kerjasama dalam pengelolaan alokasi dana desa kerjasama yang dilakukan sudah cukup walaupun terkadang terdapat kendala perbedaan pendapat dan tidak hadir saat pertemuan rapat

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis menyarankan:

1. Kepada pemerintah desa disarankan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut.
2. Disarankan aparatur desa yang memiliki riwayat pendidikan SMA untuk melanjutkan ke jenjang S1 karena dengan pendidikan pengalaman dan pembelajaran kapasitas semakin baik lagi.
3. Disarankan kepada kepala desa selaku pemimpin ditingkat desa menerapkan kepemimpinan yang memperhatikan bawahan, memotivasi, mengecek dan mengguakan komunikasi yang baik karna di dalam sebuah tim sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kerjasama antar anggota.
4. Disarankan setiap perselisihan yang timbul dalam kerjsama desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
5. Disarankan kepada pemerintah desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai APBDesa Angkasa bisa dalam bentuk spanduk/baliho, website.
6. Disarankan pengadaan teknologi yang mendukung dalam pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aang Ari Dwipayana dan Sutoro Eko. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta, IRE Press.
- Adisasmita, Rahardjo.2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Anni Milen.2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta, Pondok Pustaka.
- Amsyah Zulkiflii,2005. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Ariesto Hadi Sutopo, Adrianus Arief. 2001. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Arif Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru, Red Post Press.
- Effendy Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, CV. Indra Prahasta.
- Effendy Khasan. 2010. *Pemerintahan Desa*. Bandung, CV: Indra Prahasta.
- Emmy, Sovia. 2015. *Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat III*, Jakarta : Sianar Grafika.
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan*. Jakarta Pusat, AP21 Pres.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Ndraha Taliziduhu. 2010. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Renika Cipta.
- Ndraha Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta, Renika Cipta.
- Nurcholis, Hanif 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung, Masdar Maju.
- Simon Sumanjoyo. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta, Depublish.

- Siswanto Sastrohadiwirio. 2012. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Edisi 2. Jakarta, Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan* . Bandung, Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia* . Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Suryaningrat , Bayu. 1992. *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Suharto,Edi.2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, PT. Refika Pratama.
- Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung, Fokusmedia.
- Wasistiono, Sadu,2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, focusmedia.
- Wasistiono, Sadu.2015.*Metologi Ilmu Pemerintahan* (Edisi Revisi yang Diperluas).sumedang *Institute Pemerintahan Dalam Negreri (IPDN). Jatinagor.*
- Widjaja, Haw. 2003.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Widjaja, Haw. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Winardi.2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Wrihatnolo, R R, Dwidjowijoto, R N. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta, Elek Media Komputindo.
- Zaidan, Nawawi.2013. *Manajemen Pemerintahan*.Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Zulkarnain, 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Edisi 1.Yogyakarta, Ardana Media.

### **Jurnal-jurnal**

- Chandra dkk, 2013. Pengelolaan Alokas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 Nomor 6 Hal 1203-1212.
- Nurcholis Hanif, 2005. Pengembangan Kapasitas Pemda: Upaya Mewujudkan Pemda Yang Mensejahterakan Masyarakat. Jurnal Organisasi dan manajemen. Vol 1 Nomor 1 September 2005. Hal: 49-58
- Elma Julita, 2016. Pengelolaan Dana Desa (DD) Di Desa Sungai Ara Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Universitas Riau. Pekanbaru, Vol. 19 No. 2 Agustus 2016.
- Rhara Sulistia, 2015. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Di Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. Universitas Riau. Pekanbaru. JOM FISIP Vol.4 No.1 - Februari 2017
- Hafiz Lasmana, 2017. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga) Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017. Tanjung Pinang.
- Mislaili dkk. 2019. Kapasitas BUMDes Dendang Betuah Dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol. 7 No. 1 Februari 2019.
- Ningrum dkk. 2018. Kapasitas Organisasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Di Indonesia. Jurnal Admnistrasi Publik, Vol 1. No 1. Oktober 2018.
- Tahir, Aswar, Samirah 2019. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Universitas Negeri Makassar.
- Imam Madyono, Adji Suradji Muhammad, Dian Prima Safitri, 2016. Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam

Mengelola Alokasi Dana Desa. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 4 No 2 Tahun 2016.

Okparizan, dkk, 2019. Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Politik Vol. 8 No. 1 Juni.

Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(2), 189-199.

### **Dokumentasi**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

#### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 66 /A-UIR/5-FS/2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Juriana  
NPM : 167310433  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Angkasa Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018  
Persentase Plagiasi : 24 %  
Jumlah Halaman : 89 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)  
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 06 Januari 2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
NPK. 970702230